

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP TAHUN 2019

(Revisi hasil Rekomendasi Bagian Organisasi)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

Jalan surohadikusumo no 1

PEMALANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja Tahun 2019. LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, Mei 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG



Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang dicapai di tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Prioritas Daerah

Sasaran : Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi

Indikator : Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pemalang menargetkan 12 titik hotspot yang terbangun, untuk indikator Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat. Adapun realisasinya adalah 13 titik hotspot telah terbangun. Berdasarkan hal tersebut, maka sebesar 108 %.

2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

Indikator 1 : Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan peringkat ke-14, untuk indikator Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Adapun realisasinya adalah peringkat ke-18. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2019 adalah sebesar 77,7 %.

Indikator 2 : Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id dan sub domainnya.

Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 100%, untuk indikator Tingkat pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id dan sub domainnya. Adapun realisasinya adalah 49%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indicator Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id dan sub domainnya untuk Tahun 2019 adalah sebesar 49%.

Indikator 3 : Prosentase layanan Pengaduan Masyarakat secara on line yang ditindaklanjuti

Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 80 %, untuk indicator Prosentase layanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti . Adapun realisasinya adalah 46 %. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indicator Prosentase Layanan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti untuk Tahun 2019 adalah sebesar 57,5 %.

b. Sasaran 2 : Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 1 : Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar

Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 80 % untuk indikator Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar Adapun realisasinya adalah sebesar 60 %. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator untuk tahun 2019 adalah sebesar Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar untuk tahun 2019 sebesar 75 %.

Indikator 2 : Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan nilai 3 untuk indikator Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun realisasinya adalah sebesar 2,91. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Tahun 2019 adalah sebesar 96 %.

Indikator 3 : Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang
menargetkan 60% untuk indikator Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan
Informasi. Adapun realisasinya adalah sebesar 30%. Berdasarkan hal tersebut, maka
capaian indikator Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi untuk tahun
2019 adalah sebesar 50%.

c. Sasaran 3 : Terintegrasinya Data Antar SKPD/OPD

Indikator : Prosentase Ketersediaan Statistik Terintegrasi
Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang
menargetkan 80% untuk indikator Prosentase Ketersediaan Statistik Terintegrasi.
Adapun realisasinya adalah sebesar 65%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian
indikator Prosentase Ketersediaan Statistik Terintegrasi untuk tahun 2019 adalah
sebesar 81 %.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan

kinerja perangkat daerah

Indikator : Nilai LKJIP (SAKIP)Perangkat Daerah

Sampai saat laporan ini dibuat, nilai SAKIP Diskominfo untuk Tahun
2019 belum keluar sehingga untuk nilai SAKIP digunakan hasil penilaian Tahun
2018. Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang
menargetkan 54 untuk indicator Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan dan pelaporan kinerja perangkat daerah. . Adapun realisasinya
adalah sebesar 56,12 Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja
perangkat daerah untuk tahun 2018 adalah sebesar 120 %.

e. Sasaran 5 : Memperkuat Kualitas Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

Indikator : Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang Komunikasi dan Informatika

Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 80% untuk Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun realisasinya adalah sebesar 60 %. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian untuk Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2019 adalah sebesar 75 %.

f. Sasaran 6 : Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di mata

Publik

Indikator : Rasio berita positif negative di media minstream tentang

Pemerintah Kabupaten Pemalang

Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 80.20 untuk Rasio berita positif negative di media minstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang. Adapun realisasinya adalah sebesar 70:30. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian untuk Rasio berita positif negative di media minstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2019 adalah sebesar 70 %.

g. Sasaran 7 : Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Informasi Publik

Indikator : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan literasi media

Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 14 kelompok untuk : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan literasi media. Adapun realisasinya adalah sebesar 9 kelompok. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian untuk : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan literasi media tahun 2019 adalah sebesar 64 %.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang juga ditunjukkan oleh pencapaian target

terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 4 target indicator yaitu:

- a. Prosentase penduduk terlayani mobile broadband (terlayani)
Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 92 % dan terrealisasi sebesar 93,5 % sehingga capaian kinerja untuk indicator tersebut di atas sebesar 101 %
- b. Proporsi individu yang menggunakan internet
Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 92 % dan terrealisasi sebesar 50,5 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 55 %
- c. Persentase SKPD telah menyusun peraturan layanan informasi publik
Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 66,6 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 66,6 %
- d. Persentase penyelesaian sengketa informasi public melalui mediasi atau ajudikasi non litigasi
Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 71 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 71 % .

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan/tantangan yang dihadapi

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Koneksi G2G

- a. Antar OPD belum terintegrasi baik dalam hal aplikasi data maupun jaringan interkoneksi
- b. Format data pada aplikasi di OPD belum sama sehingga sulit dilakukan interoperability

2. Koneksi G To Netizen/ Bisnis

Fasilitas wifi gratis di RTH atau area publik belum menyeluruh di masing-masing kecamatan

3. Belum semua OPD menitipkan server di data center baru 33%

4. Banyak sistem elektronik yang berplatform (Operating System, Database) yang berbeda.
5. Kurangnya SDM yang Menguasai teknis programming Networking untuk maintenance sistem elektronik dan infrastruktur komputer
6. Kurangnya SDM PNS pada bidang Jurnalistik dan penyiaran

2. Urusan Persandian

1. Belum terpenuhinya tingkat kematangan/maturitas Standar Keamanan Informasi
2. Kurangnya SDM PNS dibidang keamanan Siber dan Persandian
3. Kurangnya sarana ruangan yang standar keamanan informasi
4. Kurangnya kesadaran aparat pemerintah di bidang Keamanan Siber

3. Urusan Statistik

1. Belum terintegrasikannya data statistic Sektoral
2. Kurangnya SDM bidang Statistik yang memadai
- 3 Kurangnya Pemahaman OPD mengenai Statistik Sektoral

B. SOLUSI YANG DI LAKUKAN

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Mengintensifkan rapat koordinasi pemangku sistem elektronik / OPD untuk mewujudkan integrasi sistem
2. Melalui konversi data bagi data yang telah terbangun dan penyamaan data pada periode berikutnya (dengan MY SQL)
3. Pertemuan tekhnis PIC Walidata dari masing-masing OPD guna penyamaan persepsi dengan melalui ekspor dan impor data
4. Interoperability data ditingkatkan dan dipusatkan ke Diskominfo serta disiapkan co locationnya

6. Bekerjasama dengan provider Telekomunikasi untuk merecovery area yang blank sport dan Intensitaskan rapat koordinasi pemangku sistem elektronik / OPD untuk mewujudkan integrasi sistem
7. Peningkatan Kapasitas SDM guna memenuhi standar kompetensi SDM yang di butuhkan
8. Mengoptimalkan tenaga non PNS (kontrak)

2. Urusan Persandian

1. Pemenuhan Standar Keamanan Informasi
2. Pengusulan Formasi PNS untuk JFT Sandiman
3. Pengusulan penambahan bangunan ruangan yang memenuhi standar keamanan informasi
4. Pengusulan Bimtek / Pelatihan / sandiman dibidang keamanan sandiman

3. Urusan Statistik

1. Membangun metadata indicator pembangunan dan standarisasi Data Sektoral
2. Mengirimkan personil mengikuti Bimtek statistik guna peningkatkan kapasitas SDM
3. Menyelenggarakan Sosialisasi/Bimtek dan Rakor tentang Statistik Sektoral dengan peserta OPD

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	10
BAB 1 PENDAHULUAN	11
A. Gambaran Umum	12
i. Struktur Organisasi	12
ii. Tugas Pokok dan Fungsi	12
B. Isu Strategis	13
C. Keuangan	14
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	15
A. Perencanaan Strategis	15
i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
ii. Tugas Pokok dan Fungsi	22
B. Perjanjian Kinerja	32
C. Rencana Anggaran	34
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	40
B. Akuntabilitas Anggaran	67
i. Realisasi Anggaran	67
ii. Analisis Efisiensi Sumber Daya	69
C. Inovasi	
BAB 4 PENUTUP	71
LAMPIRAN	

BAB 1

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

GAMBARAN UMUM

i. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat terdiri dari
 1. Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 1. Seksi Informasi Publik,
 2. Seksi Komunikasi Publik,
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur E-Government,
 2. Seksi Pengelolaan aplikasi E-Government,
- e. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik terdiri dari:
 1. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian,
 2. Seksi Statistik,
- f. UPTD,
- g. Kelompok Jabatan fungsional

ii. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
- c. Belum meratanya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap teknologi informasi;
- d. Belum terintegrasinya data sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
- e. Belum terintegrasinya pengelolaan aplikasi di lingkungan SKPD/OPD Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

2. Urusan Persandian

- a. Masih kurangnya kesadaran keamanan informasi Pejabat Negara dan aparatur Negara;
- b. Adanya kerawanan dan ancaman perusakan sistem komunikasi elektronik, aplikasi server dan data center;
- c. Adanya kerawanan dan ancaman keamanan jaringan komunikasi pejabat Negara dan OPD Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
- d. Terbatasnya fasilitas peralatan persandian.

3. Urusan Statistik

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat arti pentingnya data;
- b. Terbatasnya/sulitnya akses data pembangunan;

- c. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistic sektoral.

C. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2019 berasal dari Dana Alolasi Umum dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pada tahun anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 23.773.685.644,00 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.911.821.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 19.773.823.000,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 19.773.823.000,- yang didukung oleh 12 program dan 58 kegiatan. Sedangkan belanja langsung yang dari DBHCHT sebesar Rp. 650,000.000- yang didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan.

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 050.3/24/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendukung **Misi yang ke- 1 (satu)** yaitu Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat, dan gotong royong dan **Misi yang ke 6 (Enam)** yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Tabel. 2.1

**Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**

Tujuan	Sasaran	Indikasi sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan Informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hot spot	Na	3	6	9	12	14	14

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran SKPD untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Adapun Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat di dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Tujuan, sasaran dan Indikator Dinas Kominfo 2016 - 2021

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)					
Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong	Nilai AKIP PD	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	- Nilai LKJIP SAKIP PD	C (52)	C (54)	CC (56)	B (60)	B (61)
Meningkatkan jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi public	- Peningkatan keterbukaan informasi publik	16	14	14	12	10
			- Tingkat pemenuhan informasi publik pada website pemalang kab.go.id dan website perangkat daerah	70	80	100	100	100

			Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	40	60	80	100	100
		Memperkuat kualitas aparat komunikasi informatika	Prosentase aparatur sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	40	60	80	100	100
		Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika	-Tersedianya data center dan NOC dengan berstandar -	40	60	80	100	100
			Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Na	3	3	3	3
			Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI	20	40	60	70	80

		Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pematang di Mata Publik	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pematang	60:40	70:30	80:20	90:10	95:5
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	- Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	12	13	14	14	14

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)					
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan Publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	-Pemeringkatan keterbukaan informasi public	16	14	14	12	10
		-Tingkat pemenuhan informasi public pada website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah	70	80	100	100	100
		-Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	40	60	80	100	100
	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika	-Tersedianya data center dan NOC dengan berstandar	40	60	80	100	100
		-Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Na	3	3	3	3
		-Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)	20	40	60	70	80
	Ketersediaan Sistem dan Data Statistik Terintegrasi	Prosentase ketersediaan data statistik terintegrasi	40	60	80	100	100

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Program

Tabel 2.5

Tujuan, sasaran dan Indikator beserta program Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Target Tahun 2019	Nama Program	Indikator program	Target Kinerja program Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKJIP (SAKIP PD)	Nilai	CC (56	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program	1.Tersedianya pelayanan adminsitrasi perkantoran 2.Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3.Meningkatnya kualitas aparatur	80% 80% 80%

					<p>peningkatan Kualitas Aparatur</p> <p>4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</p> <p>5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>	<p>4.Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaranSKPD</p> <p>5.Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan</p>	<p>80%</p> <p>80%</p>
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu - Tingkat pemenuhan informasi publik pada website Pemalangkab.go.id - Pemingkatan keterbukaan Infomasi Publik 	<p>Persen</p> <p>Persen</p> <p>Peringkat</p>	<p>80%</p> <p>80%</p> <p>14</p>	<p>Program Penguatan Kelembagaan dalam Komunikasi dan Informasi Daerah</p> <p>Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di Kabupaten Pemalang</p> <p>Prosentase Website OPD yang aktif update data</p> <p>Prosentase OPD yang memiliki Website</p> <p>Meningkatnya kualitas informasi melalui media cetak dan</p>	<p>14 kelompok</p> <p>80%</p> <p>100%</p> <p>80%</p>

						elektronik	
	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	- Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Persen	80%	Program Fasilitas peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	Prosentase SKPD yang telah memiliki website Prosentase ASN yang trampil di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika	72% 80%
	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	Persen	80:20	Program kerjasama informasi dengan media massa	- Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah , radio dan televisi - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui baru (on line)	4 kali 4 kali

					Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang 	<p>1 kali</p> <p>3 kali</p>
						Prosentase OPD yang memiliki Website	100%
						Meningkatnya kualitas informasi melalui media cetak dan	80%

		Manajemen Pengamanan Informasi	persen	60%	Pengembangan Persandian/Informasi Daerah	pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	100%
	Ketersediaan Sistem dan Data Statistik Terintegrasi	Tersedianya Sistem dan Data Statistik Terintegrasi	Persen	60	Program Pengembangan Data/Statistik/Informasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Kabupaten dalam angka - Jumlah dokumen kecamatan dalam angka - Jumlah dokumen PDRB kecamatan - Jumlah dokumen Indeks Harga konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten pemalang - Jumlah dokumen NTP Kabupaten pemalang - Jumlah dokumen 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

						indikator penting pembangunan daerah kabupaten pemalang	
--	--	--	--	--	--	---	--

ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 2.6

Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
2	Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	- Pemanfaatan TIK dalam kegiatan pelayanan publik secara transparan, cepat dan handal.	<ul style="list-style-type: none"> - Restrukturasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di setiap OPD. - Meningkatkan peran PPID dalam menghimpun dan mengelola data - Menyusun SOP Standar Layanan Informasi Publik. - Menyediakan sarana informasi publik.

				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan informasi publik.
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan konten layanan informasi publik.
				<ul style="list-style-type: none"> - Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
				<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan layanan informasi.
		Meningkatnya kualitas Aparatur di bidang Komunikasi Informatika	Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keahlian dan keterampilan Aparatur Sipil Negara di setiap SKPD/OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima
		Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya di Mata Publik	Optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan media informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.	<p>Meningkatkan kerjasama informasi dengan media massa</p> <p>Meningkatkan kualitas media milik pemerintah daerah</p> <p>Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran,</p> <p>kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih</p>

				dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk diseminasi program pembangunan, penyediaan database profil wilayah dan meningkatkan pelayanan publik.	<p>Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran,</p> <p>kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih</p> <p>dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya</p> <p>Pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>
2	Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika	Mengembangkan sarana dan prasarana TIK untuk mewujudkan data terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun data center dan NOC berstandar. - Pengembangan jaringan FO - Fasilitasi pemerintah kepada masyarakat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi - Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras

				<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun standar basis data-
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data.
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan server basis data dan aplikasi
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas
				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan dan memelihara data center
		Ketersediaan Data Statistik terintegrasi	Mengoptimalkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dan penguatan statistic sektoral
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (Perubahan)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat Jawa Tengah	Peringkat	14
		Tingkat pemenuhan informasi publik pada website Pemalangkab.go.id	Persen	80
		Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persen	80
2	Memperkuat kualitas Aparat	Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang	persen	80

	Komunikasi Informatika	komunikasi dan informatika		
3	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	Persen	80
		Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3
		Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Sertifikat	60
4	Terintegrasinya data antar seluruh SKPD/OPD	Prosentase ketersediaan data statistik terintegrasi	Persen	70
5	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKJIP (SAKIP PD)	Nilai	CC(56)
6	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar di Mata Publik	Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar	Persen	80:20
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	Jumlah	14

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 17.938.216.000 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.738.216.000 dan Belanja Langsung Rp.14.200.000.000 Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp. 23.685.644.000,00, terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 3.911.821.000,00 dan belanja langsung Rp 19.773.823.000,00. Adapun target belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang melalui APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

TARGET BELANJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2019

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.010.951.000,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.021.900.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 359.725.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 231.112.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Rp. 222.335.000,00	APBD
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 9.813.325.000,00	APBD

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
7.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp. 376.174.500,00	APBD
8.	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Rp. 1.695.271.500,00	APBD
9.	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Rp. 370.612.000,00	APBD
10.	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Rp. 3.703.617.000,00	APBD
11.	Praogram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp. 599.977.000,00	APBD
12.	Program Pengembangan data/Informasi Persandian	Rp. 368.823.000,00	APBD

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Infotrmatika Kabupaten Pematang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	570.259.500	2,89	Didukung oleh 2 Program Yakni 1. Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah 2. Peningkatan Tata laksana Komunikasi dan Informatika.
2	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika	10.182.148.000	51,3	Didukung oleh 2 Program yakni: 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa 2. Program Pengembangan Data/Informasi Persandian
3	Ketersediaan Sistem dan data Statistik terintegrasi	599.977.000	3,0	Didukung oleh 1 Program yakni Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

4.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	2.846,023.000	14,3	<p>Didukung oleh 5 program yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
5.	Memperkuat Kualitas Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	376.174.500	1,9	<p>Didukung oleh 1 Program yakni</p> <p>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika</p>
6.	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya di mata Publik	5.139,241.000	25,9	<p>Didukung oleh 2 Program yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerjasama Informasi dengan mass media 2. Program Peningkatan Tata laksana di bidang Komunikasi dan Informatika

7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Informasi Publik	60.000.000	0,3	Didukung oleh 1 Program yakni: Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah
----	---	------------	-----	---

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

B. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk Capaian masing-masing indicator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok” dengan rumus hitungan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91 %	Sangat Baik	
2.	76 – 90 %	Tinggi	
3.	66 – 75 %	Sedang	
4.	51 – 65 %	Rendah	
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Pencapaian Kinerja Program Prioritas Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengemban amanah atas pencapaian program prioritas Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 2016-2021. **Misi yang ke 6** (Enam) yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah. Capaian Kinerja untuk Indikator sasaran Program Prioritas daerah adalah sebagaimana tersebut:

Tabel 3.1:

Capaian Kinerja Program Prioritas Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2019			Target Akhir Rens tra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2017	2018	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	4	10	12	13	108 %	14	93 %

Pencapaian target program prioritas daerah yakni cakupan layanan TI bagi masyarakat dengan target jumlah titik hotspot yang terbangun 12 titik pada tahun 2019 telah tercapai 13 titik atau 108%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yakni Tahun 2021, maka telah tercapai 93 %. Adapun hotspot area yang telah terbangun yakni, di RTH Patih Sampun, RTH Comal, Gandulan Cullinary Center, Alun-alun Moga, Randudongkal, Pulosari, Widuri, Watukumpul, Petarukan, Ulujami. Adapun yang hanya jaringannya saja Bodeh, Belik, dan Bantarbolang.

B. Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2019 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Tabel Capaian Kinerja atas Perjanjian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TARGET AKHIR RPJMD (2021)	KINERJA s/d 2019 (%)
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
1.	Meningkatnya layanan informasi dan Aspirasi Publik	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Tengah	14	18	77,7	100	55%
		Tingkat pemenuhan informasi public melalui website pemalangkab.go.id beserta sub domainnya	80	49	61,25	100	49%
		Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	80	46	57,5	100	46%
12.	Meningkatnya Layanan telekomunikasi dan Informatika	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	80	60	75	100	75
		Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	2,91	96	3	96

		Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	60	30	50	70	71
13.	Ketersediaan Data Statistik terintegrasi	Prosentase Ketersediaan Data Statistik terintegrasi	80	65	81	100	65%

SASARAN 1 : Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

Sasaran meningkatnya Layanan Informasi dan aspirasi Publik didukung oleh 3 indikator yakni Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Jawa Tengah, Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id beserta sub domainnya dan Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2017	2018	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
.	Meningkatnya layanan informasi dan Aspirasi Publik	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Tengah	16	17	14	18	77,7	100	55%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2017	2018	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
		Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website Pemalangkab.go.id dan sub domainnya	50	70	100	49	49	100	49%
		Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	40	60	80	46	57,5	100	46%
		Persentase capaian sasaran 1				62%			50%

Adapun penjelasan capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator 1 : Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Formulasi perhitungan: Nilai/Skor Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik. Indikator ini dihitung berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Tahapan penilaian ada tiga yakni tahap pertama pengisian formulir SAQ, tahap kedua verifikasi formulir SAQ dan tinjauan lapangan, dan tahap ketiga Uji Publik. Badan Publik yang telah lolos tahap pertama yakni pengisian formulir SAQ, akan mengikuti tahap berikutnya yakni verifikasi dan tinjauan lapangan dan uji Publik. Selanjutnya hasil evaluasi akan dilakukan pemeringkatan berdasarkan urutan nilai. Tahun 2019 ditetapkan target peringkat ke 14 tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan realisasinya peringkat ke 18 dengan nilai 74,83 atau 77,7 % dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan target pada akhir Tahun Renstra yakni peringkat ke 10, maka realisasinya baru 55 %. Kabupaten Pemalang dengan peringkat ke-18 mendapatkan predikat cukup informatif dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Hasil evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2019, menurun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang peringkat ke 17. Permasalahannya disebabkan karena:

1. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah mengenai Keterbukaan Informasi Publik
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia ASN pengelola Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang akan dilakukan antara lain :

1. Meneguhkan kembali Komitmen Perangkat Daerah Terhadap Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara

Dari sisi kelembagaan, jumlah perangkat daerah yang telah menyusun peraturan tentang keterbukaan informasi ada 66% . Targetnya pada tahun 2019, seluruh perangkat daerah telah menyusun peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Jumlah pemohon informasi publik yang masuk pada tahun 2019 ada 39 permohonan. Terbagi dalam dua jenis pelayanan yakni on line dan datang langsung kepada PPID utama. Dari pemohon informasi yang ada 39 pemohon telah dilayani dan 4 pemohon mengajukan sengketa karena tidak puas dengan

pelayanan dari PPID Pemerintah Kabupaten Pemalang. Sengketa di Komisi Informasi yang selesai di Tahun 2019 sejumlah 4.

Indikator Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik didukung oleh satu Program yakni Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika dengan kegiatan Pengelolaan dan Inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah, rencana anggaran Rp. 259.647.500,00 dan realisasi Rp.244.933.002 dengan capaian 94,33%.

2. Indikator 2 : Tingkat pemenuhan informasi publik pada website pemalangkab.go.id beserta sub domainnya.

Definisi Operasional : Jumlah website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah yang menyediakan Informasi Publik dibandingkan dengan jumlah seluruh website perangkat daerah.

Rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah yg menyediakan inf}}{\text{Jumlah seluruh website pemalangkab.go.id dan perangkat daerah}} \times 100\%$$
$$= 24 \text{ PD} : 49 \text{ PD} \times 100\% = 49 \%$$

Tingkat pemenuhan Informasi Publik pada website pemalangkab.go.id beserta sub domainnya digunakan untuk mengukur sejauhmana Pemerintah Kabupaten Pemalang menyediakan layanan informasi public. Pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 100%. Dan realisasinya baru mencapai 49% dari target yang ditetapkan. Tingkat pemenuhan informasi publik dihitung dari domain website pemalangkab.go.id dan sub domain website perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan. Jumlah website perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan ada 49 buah. Dari 49 website yang ada, yang aktif 24 dan 25 website pada tahun 2019 tidak aktif.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, capaian indicator tingkat pemenuhan informasi public pada website pemalangkab.go.id dan sub domainnya menurun. Pada Tahun 2018, capaian untuk indicator ini sebesar 70%. Menurunnya capaian disebabkan karena banyak perangkat daerah

yang tidak mengupdate informasi yang ada di websitenya. Website yang bahkan tidak aktif. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola website di perangkat daerah.

Untuk mendukung pencapaian target indicator tersebut ada satu Program Pendukung yakni Program Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan Informasi Daerah dengan kegiatan Revitalisasi pendayagunaan media center daerah rencana anggaran Rp. 171.345.000 dan Realisasi Rp. 151.733.244 dan capaian 88,5%.

3. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti

Formulasi Perhitungan: Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah aduan masyarakat yang masuk.

Rumus : Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti

$$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$$

Jumlah aduan masyarakat yang masuk

$$= 27 : 59 \times 100 \% = 46\%$$

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 80% aduan ditindaklanjuti. Jumlah aduan masyarakat Kabupaten Pemalang melalui sarana " HALLO BUPATI " dan LAPOR SP4N selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2019 sejumlah 59 aduan. Dari 59 aduan tersebut sejumlah 27 aduan (46%) telah ditindaklanjuti dan 32 aduan belum ditindaklanjuti. Masih ada 54 % aduan yang belum ditindaklanjuti.

Adapun rekapitulasi aduan masyarakat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

REKAP PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI HALO BUPATI PER BULAN TAHUN 2019

No.	Bulan	Jumlah	Terjawab	Tidak
1.	Januari	0	0	0
2.	Februari	0	0	0
3.	Maret	1	1	0
4.	April	2	1	1
5.	Mei	1	1	0
6.	Juni	5	3	2
7.	Juli	5	2	3
8.	Agustus	9	6	3
9.	September	8	4	4
10.	Oktober	2	0	2
11.	November	9	3	6
12.	Desember	17	6	11
	Jumlah	59	27	32

Tabel. 3.5
DAFTAR REKAPITULASI ADUAN MASYARAKAT
HALO BUPATI PEMALANG TAHUN 2019

NO.	JENIS ADUAN	JUMLAH ADUAN	ADUAN YG TERJAWAB	ADUAN YANG TIDAK TERJAWAB
1	Administrasi	11	6	5
2	Administrasi Kependudukan	5	2	3
3	Bantuan Pangan	1	0	1
4	Bantuan Sosial	2	2	0
5	Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	0	1
6	Dana Desa	3	0	3
7	Gangguan Aplikasi Pendaftaran Online	1	0	1
8	Informasi Umum	1	0	1
9	Infrastruktur	3	1	2
10	Kartu Indonesia Pintar (KIP)	1	1	0
11	Keamanan dan Ketertiban	2	0	2
12	Kategori Informasi	1	1	0
13	Keluhan Data peserta tidak sesuai (NIK)	1	1	0
14	Keluhan Jam Operasional Faskes	2	0	2
15	Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1	0	1
16	Pelayanan Kesehatan	1	1	0

17	Pelayanan Masyarakat	2	0	2
18	Pemasyarakatan	2	2	0
19	Pemerintahan Desa	5	1	4
20	Pendidikan	2	2	0
21	Penyalahgunaan Wewenang	1	1	0
22	Perparkiran	1	1	0
23	Pertanahan dan Permukiman	1	1	0
24	Program Keluarga Harapan (PKH)	3	2	1
25	Sikap Petugas Puskesmas/Rumah Sakit Dalam Melayani	3	2	1
26	Topik Khusus	1	0	1
27	Transportasi Darat	1	0	1
	JUMLAH	59	27	32

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, realisasi capaian indicator Prosentase layanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu menurun. Pada Tahun 2018, realisasi mencapai 60% aduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Sedangkan tahun 2019 hanya 56%.

Menurunnya capaian kinerja tersebut di atas disebabkan karena aplikasi Hallo Bupati tidak bisa diinteroperabilitaskan atau diintegrasikan dengan aplikasi SP4N LAPOR Kementerian PAN dan Lapor Jateng. Sehingga perangkat daerah banyak yang tidak bisa mengakses aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi LAPOR SP4N dan Lapor Jateng. Solusi yang akan dilakukan ke depan apabila aplikasi "Hallo Bupati" tidak bisa diintegrasikan adalah dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara saja yakni LAPOR SP4N.

Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi daerah dengan kegiatan Penguatan Komunikasi Publik melalui website dan SMS Center rencana anggaran Rp. 139.267.000. realisasi Rp. 124.681.046,00 dan capaian 89,53%.

SASARAN 2:

Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika.

Untuk mencapai sasaran kedua yakni Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, diukur dari tiga indikator yakni, Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar, Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Tabel. 3.6

Pengukuran Kinerja Sasaran 2 : Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2017	2018	Target	Capaian	%		
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Terwujudnya pengembangan	Tersedianya Data Center dan NOC	40	60	80	60	75	100	75

n infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	dengan berstandar								
	Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Na	3,11	3	2,91	96	3	96	
	Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Na	20	60	30	50	70	71	
	Persentase capaian sasaran 2				74			81	

Adapun rincian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar

Definisi Operasional = Jumlah server yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan server

Rumus perhitungan= Jumlah server yang tersedia

$$\frac{\text{Jumlah server yang tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan server}} \times 100$$

Jumlah kebutuhan server

$$= 30 : 60 \times 100\% = 60\%$$

Tersedianya data center dengan NOC berstandar merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan sarana dan prasarana (Infrastruktur) komunikasi dan informatika. Tahun 2019 ditetapkan target 80%. Dari target yang ditetapkan terealisasi 60 % .

Dengan demikian untuk target tersedianya data center dengan NOC berstandar, realisasinya 75%. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 yakni 100 %, maka capaian tahun 2019 maka capaiannya masih 60 %.

Data Center telah tersedia dengan lokasi di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun demikian belum semua perangkat daerah menitipkan servernya di Data Center yang telah tersedia. Terkait dengan standarisasi, Data Center Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya saat ini belum memenuhi standar yang diakui secara internasional yakni ISO/IEC 27001:2009

Permasalahan yang ada dalam pencapaian indikator ini adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia ASN Pengelola Data Center. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan upaya pengusulan formasi ASN untuk formasi jabatan Pengelola Data Center pada Tahun 2019.

Program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Program Pengembangan, Komunikasi dan Media Massa dengan kegiatan:

1. Fasilitasi Pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik rencana anggaran Rp320.000.000 Realisasi Rp. 317.489.500,00 Capaian 99,22 %
2. Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi rencana anggaran Rp 4.429.480.000,00, realisasi Rp4.372.026.155.,00 capaian 98,70.%

2. Penilaian Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik

Definisi Operasional: Nilai/Skor yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

Penilaian Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana implementasi E-Government di Kabupaten Pematang Jaya, dilihat dari ketersediaan infrastruktur baik lunak maupun keras, ketersediaan aplikasi. Sebelum ada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, penilaiannya disebut dengan indeks E-Government Indonesia atau Indeks PEGI (Penilaian E- Government Indonesia). Tahun 2019 target yang ditetapkan mendapatkan nilai/skor 3 dan mendapatkan nilai/skor 2,91, sehingga realisasinya 96%. Perolehan nilai Tahun 2019 ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang

mendapat nilai 3,11. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra yakni 3, maka capaiannya sudah 96%. Menurunnya Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya disebabkan karena adanya perubahan pola penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada Tahun 2019 bobot penilaian oleh Tim penilai tinggi. Salah satunya adalah integrasi sistem aplikasi. Sementara kondisi di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya banyak system elektronik yang berplatform berbeda susah untuk diintegrasikan. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengintensifkan koordinasi dengan pemangku system elektronik perangkat daerah untuk mewujudkan integrasi sistem.

Program yang mendukung adalah Program Pengembangan, Komunikasi dan Media Massa dengan kegiatan:

1. Penyelenggaraan ekosistem smart city rencana anggaran Rp.2.193.520.000,00 Realisasi Rp. 2.122.500,525,00 Capaian 96,76 %
2. Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagai pakai rencana anggaran Rp795.194.500,00 realisasi Rp. 744.686.532,00 .capaian 93,65.%
3. Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah rencana anggaran Rp. 866.912.500 realisasi Rp 810.713.828,00 capaian 93,52 %
4. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi anggaran Rp. 937.893.000,00 realisasi Rp.874.250.247 ,00 capaian 93,21 %

3. Indikator Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi

Definsi Operasional= Penilaian Indeks SMPI

Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keamanan informasi pemerintah daerah. Pada Tahun 2019 ditetapkan target sebesar 60%, dan realisasinya 30 % atau 50 % dari target. Dan dibandingkan dengan target akhir Renstra 70%, maka capaiannya baru 71 %.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, penilaian dalam indeks Keamanan Informasi dilakukan dengan cakupan keseluruhan persyaratan pengamanan yang tercantum dalam standar ISO/IEC 27001:2009, yang disusun menjadi 5 (lima) area yakni :

1. Tata Kelola Keamanan Informasi

Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi /fungsi, tugas dan tanggungjawab pengelola keamanan informasi

2. Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan resiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi

3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi

Mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya

4. Pengelolaan Asset Informasi

Mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap asset informasi termasuk keseluruhan siklus penggunaan asset tersebut

5. Teknologi dan Keamanan Informasi

Mengevaluasi kelengkapan konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan asset informasi.

Berdasarkan hasil Assesor yang dilakukan oleh BSSN dan Studi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang bekerjasama dengan PT Pilar Teknotama Yogyakarta, didapatkan informasi bahwa sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya diterapkan untuk memenuhi kriteria atau acuan indeks KAMI dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016.

Permasalahan terkait pencapaian indicator sasaran ini antara lain:

1. Kurangnya SDM PNS di bidang keamanan syber dan persandian
2. Belum adanya sarana Security Operating Center (SOC)
3. Kurangnya ruangan yang standar keamanan informasi

Solusi untuk permasalahan tersebut di ats antara lain:

1. Mengusulkan Formasi ASN JFT Sandiman
2. Pengusulan Pembangunan SOC setelah JFT Sandiman terpenuhi.

Adapun Program yang mendukung antara adalah Program Pengembangan,data/informasi Persandian dengan kegiatan

1. Pengamanan komunikasi dan informasi rencana anggaran Rp 173.500.000,00. Realisasi Rp. 171.003.000,00 Capaian 98,56%.

2. Penyelenggaraan keamanan informasi rencana anggaran Rp195.323.000,00 realisasi Rp183.985.500,00 capaian 94,20 %.

SASARAN 3 :

Ketersediaan Sistem dan Data Statistik terintegrasi

Tabel. 3.7

Pengukuran Kinerja Sasaran 3 : Terintegrasinya Data Antar SKPD/ OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2017	2018	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Tersedianya Sistem dan Data Statistik terintegrasi	Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi	Na	90	80	65	81	100	65 %
		Persentase capaian sasaran 2				81			65

Definisi Operasional : Jumlah Data Statistik Terintegrasi dibandingkan jumlah keseluruhan data Statistik Sektoral

Rumus Perhitungan : Jumlah Data Statistik Terintegrasi

----- x 100 %

Jumlah seluruh data statistic sektoral

Prosentase data antar SKPD/ O data PD yang terintegrasi merupakan indikator yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya sasaran Terintegrasinya data SKPD/OPD.

Indikator Prosentase data antar SKPD/ OPD yang terintegrasi tahun 2019 ditetapkan target 80% dan realisasinya 65% atau 81 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka realisasinya baru 65% Indikator Jumlah dokumen (Kabupaten dalam angka, Kecamatan dalam angka, PDRB kecamatan, Indeks Harga Konsumen dan laju inflasi, NTP Kabupaten Pematang Jaya, Indikator penting pembangunan daerah Kabupaten Pematang Jaya) Tahun 2019 target 6 dokumen dan realisasinya 6 dokumen atau 100%. Pada tahun 2018, telah disusun Metadata Pembangunan sebagai panduan bagi produsen data di dalam mengukur data indikator pembangunan. Dan aplikasi Pematang Jaya Dalam Genggaman berbasis android dan web.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Kurangnya SDM bidang Statistik yang memiliki kompetensi
2. Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah mengenai Statistik Sektoral

Adapun solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis /Sosialisasi/Pelatihan dan Rakor tentang Statistik Sektoral.
2. Mengirimkan personil untuk mengikuti Bimbingan Teknis Statistik.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Pengembangan Data Statistik Daerah dengan kegiatan:

1. Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah rencana anggaran
Rp. 474.977.000,00 Realisasi Rp471.817.758,00 Capaian 99,3 %

2. Pengelolaan data statistic daerah rencana anggaran Rp. 125.000.000,00 realisasi Rp119.695.500 .capaian 95,76 %

C. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Selain Indikator Kinerja Utama

SASARAN 1

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja sasaran Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2017	2018	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKJIP (SAKIP)	Na	54	56	56,2	120	60	85

SAKIP Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sampai saat laporan ini dibuat hasil penilaian belum keluar . Sehingga dalam laporan ini menggunakan nilai evaluasi Tahun 2018. Perolahan nilai LKJIP (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 adalah 56,12. Apabila dibandingkan dengan target di Tahun 2018 C (54), maka capaiannya 120 %.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran di atas antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat target anggaran Rp. 36.000.000 dengan realisasi Rp. 31.823.600 dengan persentase 88,40 %.
- b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik target anggaran Rp. 282.000.000 dengan realisasi Rp. 245.489.377 dengan persentase 87,05 %.
- c. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor target anggaran Rp. 25.940.000 dengan realisasi Rp. 22.731.300 dengan persentase 87,63%.
- d. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional target anggaran Rp. 20.000.000 dengan realisasi Rp. 18.787.000 dengan persentase 93,94%.
- e. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan target anggaran Rp. 105.053.000 dengan realisasi Rp. 101.666.500 dengan persentase 96,78%.
- f. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor target anggaran Rp. 21.500.000 dengan realisasi Rp. 20.349.200 dengan persentase 94,65%.
- g. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor target anggaran Rp. 35.023.000 dengan realisasi Rp. 35.004.500 dengan persentase 99,95%.
- h. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan target anggaran Rp. 34.000.000 dengan realisasi Rp. 33.411.400 dengan persentase 98,27%.
- i. Kegiatan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor target anggaran Rp. 28.555.000 dengan realisasi Rp. 20.336.200 dengan persentase 71,22%.
- j. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan target anggaran Rp. 17.955.000 dengan realisasi Rp. 17.869.000 dengan persentase 99,52%.
- k. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman target anggaran Rp. 106.000.000 dengan realisasi Rp. 105.855.500 dengan persentase 99,86%.
- l. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah target anggaran Rp. 293.925.000 dengan realisasi Rp. 292.654.664 dengan persentase 99,57 %.
- m. Kegiatan Penyediaan jasa keamanan Target Anggaran Rp. 5.000.000 dengan realisasi Rp. 4.973.500 dengan persentase 99,47%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor target anggaran Rp. 97.500.000 dengan realisasi Rp. 93.121.958 dengan persentase 95,51%.
- b. Kegiatan Pengadaan mebel target anggaran Rp. 96.900.000 dengan realisasi Rp. 88.490.000 dengan persentase 91,32%.
- c. Kegiatan Pengadaan computer dan perlengkapannya target anggaran Rp. 84.450.000 dengan realisasi Rp. 81.480.500 dengan persentase 96,48 %.
- d. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor target anggaran Rp. 118.650.000 dengan realisasi Rp. 116.481.000 dengan persentase 98,17 %.
- e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional target anggaran Rp. 82.250.000 dengan realisasi Rp. 81.849.121 dengan persentase 99,51%.
- f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor target anggaran Rp. 94.650.000 dengan realisasi Rp. 90.680.000 dengan persentase 95,81%.
- g. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebel target anggaran Rp. 41.500.000 dengan realisasi Rp. 41.480.000 dengan persentase 99,95%.
- h. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala computer dan perlengkapannya target anggaran Rp. 20.000.000 dengan realisasi Rp. 18.985.500 dengan persentase 94,93%.
- i. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik target anggaran Rp. 20.500.000 dengan realisasi Rp. 20.327.750 dengan persentase 99,16%.
- j. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor target anggaran Rp. 365.500.000 dengan realisasi Rp. 364.611.000 dengan persentase 99,76%.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD rencana anggaran Rp. 131.357.000,00, realisasi Rp. 130.312.500,00 capaian 99,20
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran rencana anggaran Rp.10.000.000,00, realisasi 8.753.500 capaian 87,54 %
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun rencana anggaran Rp. 9.880.000,00, realisasi Rp. 9.277.000,00 capaian 93,90 %

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian rencana anggaran Rp. 79.875.000, realisasi Rp. 77.161.200,00 capaian 96,60 %

4. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

1. Penyusunan data base perencanaan SKPD capaian rencana anggaran Rp. 181.335.000,00 realisasi Rp. 179.199.834 capaian 98,82.%

2. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD rencana anggaran Rp. 41.000.000 reallisasi Rp. Rp. 40.958.400,00 capaian 99,90%

SASARAN 2

Memperkuat Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

Tabel : 3.9

Pencapaian Kinerja sasaran Memperkuat Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2017	2018	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Memperkuat Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Na	50	80	60	75	100	60

Definisi Operasional : Jumlah Aparatur Sipil yang trampil di bidang Komunikasi dan Informatika dibandingkan dengan Jumlah Aparatur Pengelola Komunikasi dan Informatika.

Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan Informatika merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran memperkuat kualitas aparatur komunikasi dan Informatika. Target tahun 2019 sebesar 80% dan realisasi 60% atau 75% Kegiatan yang telah

dilaksanakan pada Tahun 2019 antara lain Bimbingan Teknis Bidang analisis data untuk petugas data yang ada di perangkat daerah, sosialisasi kehumasan, dan Bimbingan Teknis Jurnalistik.

Adapun Program yang mendukung sasaran ini antara lain :

1. Program Peningkatan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika dengan kegiatan antara lain:
 - a. Asistensi/Bimbingan Teknis Bidang Jurnalistik rencana anggaran Rp. 30.187.500 realisasi Rp. 28.329.000,00 capaian 93,84%
 - b. Sosialisasi Kehumasan rencana anggaran Rp. 320.987.000,00 realisasi Rp. 301. 251.720,00 capaian 93,84%
 - c. Bimbingan Teknis Bidang Analisis data rencana anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasi Rp. 22.195.500,00 capaian 88,78%

SASARAN 3

Membangun Citra Postif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik

Tabel. 3.11

Pencapaian Kinerja sasaran membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2017	2018	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di mata Publik	Rasio berita positif dan negative di media mainstream tentang Kabupaten Pemalang	Na	60:40	80:20	70:30	70	90:10	60

Definisi Operasional: Jumlah berita positif dan negative dibandingkan seluruh berita tentang Kabupaten Pematang

Rasio berita positif dan negative di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pematang merupakan indikator yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pematang di mata Publik. Tahun 2019 ditetapkan target Rasio berita positif dan negative di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pematang 80:20 % dan realisasi 70:30 atau 70 %. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021 yakni 95:5 maka realisasinya baru 60 %.

Program yang mendukung sasaran ini adalah:

1. Program Kerjasama Informasi dengan mass media

Kegiatan antara lain :

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah rencana anggaran Rp. 1.134.719.000 realisasi Rp. 1.079.238.268 capaian 95,11%
2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah rencana anggaran Rp. 449.342. 500 realisasi Rp. 428.233.000,00 capaian 95,3%
3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat rencana anggaran Rp. 111.210.000,00 realisasi p. 78.074.597,00 capaian 70,2%

2. Program Peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika

Kegiatan:

1. Pelayanan Informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho, dll rencana anggaran Rp. 518.020.000, realisasi Rp. 511.020.000,00 capaian 98,65 %
2. Dokumentasi dan Publikasi Program/Kegiatan SKPD rencana anggaran Rp. 888.400.000,00 realisasi Rp. 860.048.145,00 capaian Rp. 96,81%
3. Pemberian Informasi Publik melalui iklan layanan masyarakat rencana anggaran Rp. 1.191. 925.000,00 realisasi Rp. 1.143.339.244 capaian 95,92 %

4. Komunikasi Publik melalui Dialog Interaktif, radio dan televisi rencana anggaran Rp.

413.427.500,00 realisasi Rp. 378.742.396,00 capaian 91,51 %

5. Pengelolaan Program radio dan televise Daerah untuk Masyarakat rencana anggaran

Rp. 432.197.000,00 realisasi Rp. 318.839.361,00 capaian 73,77%

SASARAN 4

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik

Tabel. 3.12

Pencapaian Kinerja sasaran Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2017	2018	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	Na	15	14	9	64	14	64

Definisi Operasional : Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina di tingkat Kecamatan.

Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah 14 kelompok berbasis kecamatan. Realisasi baru ada 9 kecamatan yang telah terbentuk KIM atau 64%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 akhir Renstra yakni 14 kelompok, maka realisasinya baru mencapai 64%.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika dengan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Penguatan kelembagaan Komunikasi dan Informasi Publik rencana anggaran Rp. 60.000.000,00

D. Pengukuran Kinerja Indikator SDGis

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan *Sustainable Development Goals*(SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 4 target indicator yaitu:

a. Prosentase penduduk terlayani mobile broadband (terlayani)

Definisi Operasional : Jumlah penduduk terlayani mobile broadband dibandingkan jumlah seluruh penduduk

Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 92 % dan terrealisasi sebesar 93,5 % sehingga capaian kinerja untuk indicator tersebut di atas sebesar 101 %

b. Proporsi individu yang menggunakan internet

Definisi Operasional: Jumlah penduduk yang menggunakan internet dibandingkan jumlah seluruh penduduk

Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 92 % dan terrealisasi sebesar 50,5 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 55 %

c. Persentase SKPD telah menyusun peraturan layanan informasi public

Definisi Opeasional : Jumlah SKPD yang menyusun peraturan Layanan Informasi Publik dibandingkn jumlah seluruh SKPD

Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 66,6 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 66,6 %.

d. Persentase penyelesaian sengketa informasi public melalui mediasi atau ajudikasi non litigasi

Definisi Operasional: Jumlah sengketa informasi yang selesai dibandingkan jumlah seluruh sengketa informasi

Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 71 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 71 %

A. AKUNTABILITAS ANGGARAN

i. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja Tidak Langsung

Tabel. 3.13
Realisasi Belanja Tidak Langsung

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Tidak Langsung	
	a. Belanja Pegawai	3.495.792.13400,-
2.	Belanja Langsung	
	a. Belanja Pegawai	847.865.500,-
	b. Belanja Barang dan Jasa	15.960.703.432,-
	c. Belanja Modal	1.956.691.369,-

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil

perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategi

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Penyerapan	%
1.	Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	570.259.500	521.347.292	91,4%
2.	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.182.148.000	9.829.198.787	96,8%
3.	Terintegrasinya Data antar SKPD/OPD	599.977.000	591.513.258	98,5%
4.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	2.846.023.000	2.719.785.533	95,5
5.	Memperkuat kualitas Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	376.174.500	351.776.220	93,5
6.	Membangun citra positif Pemerintah Kabupaten Pematang di mata public	5.139.241.000	4.797.535.011	93
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi Publik	60.000.000	54.104.200	90,2

7.			
Jumlah		19.773.823.000	18.865260.301

Sumber : Laporan Kinerja Keuangan Tahun 2019

i. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Penyerapan Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	3	62	521.347.292	91,4%	0 %
2	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	74	8.722.405.040	97,1%	0 %
3	Terintegrasinya Data antar seluruh SKPD/OPD	1	81	591.513.2582.	98,5%	0%
4	Meningkatnya kualitas perencanaan	1	120	2.719.785.533	95,5	30%

	pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah					
5	Memperkuat kualitas Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	1	75	351.776.220	93,5	0%
6	Membangun citra positif Pemerintah Kabupaten Pematang di mata public	1	70	4.797.535.011	93	0%
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi Publik	1	64	54.104.200	90,2	0%

Sumber : Laporan keuangan Diskominfo Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk tahun 2019, belum semua sasaran mencapai efisiensi sumberdaya.

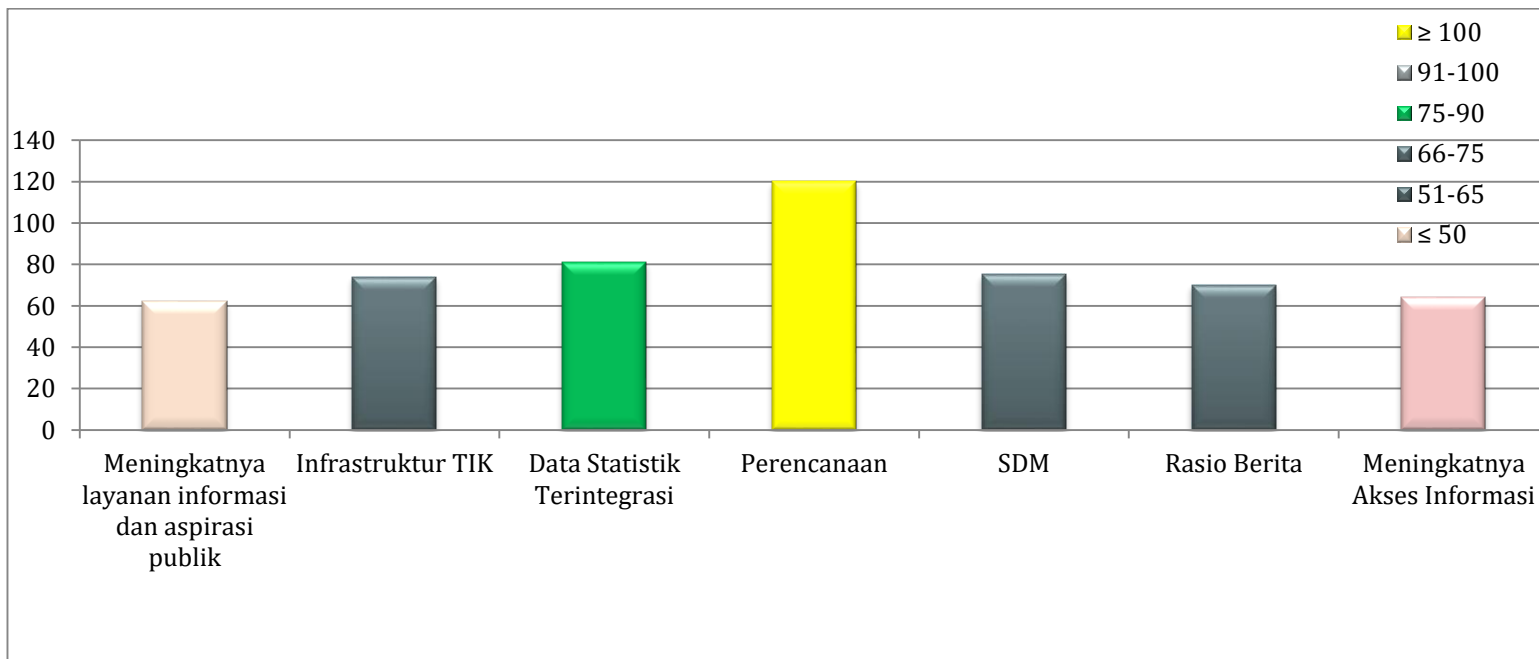
BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

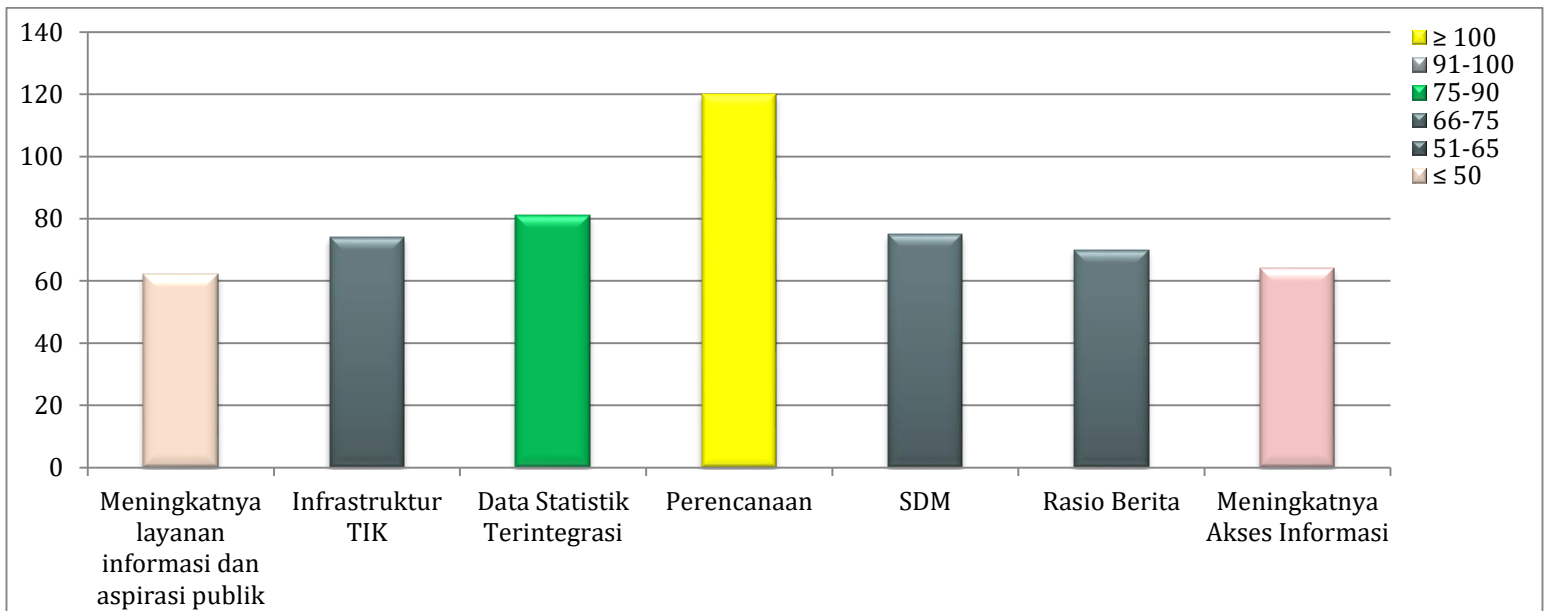
Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan skala peringkat kinerja, dari 7 sasaran strategis, terdapat 14,3 % (1 sasaran) yang skala nilai perangkat kerjanya kategori sangat baik (sesuai kategori), 14,3 % (1 sasaran) yang kategori tinggi, 42,8 % (3 sasaran) yang kategori sedang, dan 28,5 % (2 sasaran) yang kategori rendah.
2. Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Skala Peringkat Kinerja



3. Berdasarkan pemenuhan capaian kinerja 100%, dari 7 sasaran strategis, terdapat 14,3 % (1 sasaran) yang capaian kinerjanya 100 %, dan 14,3 % (1 sasaran) yang capaian kinerjanya 76-90 %, terdapat 42,8 % (3 sasaran) yang capaian kinerjanya antara 66-75 % dan 28,5% (2 sasaran) yang capaian kinerjanya antara 51-65%.

Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Pemenuhan Capaian Kinerja 100%



Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi dan Informatika melalui penyediaan jaringan Fiber Optik, dan standarisasi data center.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik melalui penyediaan konten informasi yang berkualitas
- c. Meningkatkan Ketersediaan data statistik yang terintegrasi melalui interoperabilitas data dan sistem
- d. Meningkatkan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Pematang melalui pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi secara bertahap

- e. Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui monev secara berkala

Pemalang, Mei 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PEMALANG



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and a final horizontal stroke, is written over the right side of the official stamp.

Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610821 198903 1 003

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja tahun 2019 Perubahan
2. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019
3. Hasil Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Tahun 2019
4. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018
5. Hasil Evaluasi SAKIP 2019 dari Bagian Organisasi

Dalam File tersendiri